

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dengan telah dihasilkannya data dan informasi pada hasil penelitian, baik melalui wawancara, telaah dokumen, maupun dengan observasi. Dengan mengacu terhadap rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan

1. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran belum optimal dalam rangka memperkuat Penganggaran Berbasis Kinerja disebabkan oleh BPOM beberapa faktor, antara lain:
 - a. Tidak terdapat konsistensi dalam penyusunan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Hal ini terlihat dari perbedaan penerapan sasaran strategis dan sasaran kegiatan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, sehingga membuat rumusan RSPP tidak memberikan informasi yang jelas dan belum sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dalam pedoman RSPP dan kriteria-kriteria indikator instrumen PBK
 - b. Tidak adanya pedoman RSPP yang detil oleh kemenkeu dan Bappenas membuat BPOM dalam mengimplementasikan ruang lingkup redesign sesuai instrumen yang mendukung PBK masih banyak terdapat ketidaktepatan penempatan redesign.
 - c. Belum adanya kerangka logis (*logical framework*) dalam penyusunan perencanaan jangka menengah (Renstra) BPOM, sehingga saat penerapan RSPP banyak terdapat informasi kinerja dan indikator kinerja berupa sasaran strategis yang tidak terkait dengan sasaran program, yang berdampak tidak adanya output yang menunjang langsung pencapaian sasaran strategis tersebut, dan terdapat sasaran kegiatan yang tidak memiliki anggaran. Padahal dengan adanya RSPP diharapkan informasi kinerja sudah teridentifikasi kebutuhan anggarannya. Penerapan RSPP pada level Rincian Output yang juga belum menggunakan struktur standar biaya, sehingga menyebabkan standar Biaya sebagai salah satu instrumen PBK ada

belum efisien, hal ini terlihat masih terdapatnya fenomena *budgetary slack* dalam proses penyusunan anggaran di awal. Sehingga banyak terdapat anggaran pendukung yang tidak terkait langsung dengan ketercapaian RO, serta diperkuat hasil analisis efisiensi dengan Metode DEA yang memperlihatkan masih banyak satker di BPOM yang belum efisien.

- d. Pada faktor Evaluasi kinerja satker yang tidak efisien terlihat pimpinan satker belum menjelaskan hubungan antara output yang diampu oleh unit terhadap visi dan misi organisasi melalui sasaran strategis yang terdapat di dalam Renstra kepada SDM satker, sehingga pada saat pelaksanaan dan penyusunan RSPP belum memperkuat PBK di satker-satker BPOM.
2. Berdasarkan temuan hasil penelitian pada kesimpulan pertama. Perbaikan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dirumuskan untuk mengoptimalkan penerapan RSPP dalam memperkuat PBK di BPOM. perbaikan berisi terkait strategi perbaikan dan penyempurnaan instrumen PBK sesuai kaidah-kaidah RSPP, strategi penggunaan struktur standar biaya dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya. serta merumuskan model integrasi BSC dengan *logical frameworks dalam perencanaan jangka panjang Renstra BPOM Tahun 2025-2029*

B. Saran

Atas dasar hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang dihasilkan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan RSPP dalam proses perencanaan dan penganggaran agar mampu memperkuat penganggaran berbasis kinerja di BPOM. Perbaikan dapat dilakukan melalui dua tahapan yaitu :
 - e. Perbaikan jangka pendek dilakukan dengan redesain ormasi Kinerja Program dan Kegiatan untuk proses perencanaan dan penganggaran Tahun 2024 dan 2025, sesuai kaidah-kaidah RSPP. Redesain dilakukan terutama dengan membatasi jumlah sasaran kegiatan agar tidak melebihi jumlah sasaran program, dan memilih sasaran kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran program.

- f. Solusi jangka panjang, adalah melakukan integrasi BSC ke dalam Logical framework penyusunan Renstra BPOM Tahun 2025-2029.
2. Agar dapat meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, BPOM agar menggunakan Struktur Standar Biaya, dan lebih banyak mengusulkan Standar Biaya Keluaran, baik itu Standar Biaya Keluaran Umum maupun Standar Biaya Keluaran Khusus. Penggunaan Struktur Standar biaya akan memperjelas hubungan biaya langsung dan biaya tidak langsung terhadap pencapaian suatu output.
3. BPOM dalam evaluasi kinerja agar melakukan analisis kelebihan dan kekurangan dalam pencapaian target kinerja, dilengkapi dengan tools evaluasi kinerja dengan menggunakan Model EFQM. Model evaluasi kinerja EFQM bisa memotret dari faktor kriteria kinerja (*enablers*) (kepemimpinan, SDM, kebijakan dan strategi, kemitraan dan Sumberdaya, proses) faktor kriteria hasil (*results*) kepuasan pelanggan, kepuasan SDM, dampak terhadap masyarakat, dan hasil kinerja utama. Sehingga evaluasi yang dihasilkan komprehensif dan bisa menjadi dasar untuk pengambil kebijakan dalam memutuskan kebijakan ke depannya.
4. BPOM dalam perancangan Renstra 2025-2024 agar berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, masyarakat dan stakeholder terkait, agar tujuan dan sasaran strategis yang di rumuskan bisa memenuhi harapan publik. Kolaborasi dilakukan dengan mengadakan FGD dalam bentuk konsultasi publik, masing-masing unit eselon 1 menjangking masukan melalui kanal-kanal media yang ada, bisa melalui pertemuan langsung, pertemuan daring dan bisa menyebarkan kuisioner kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kolaborasi dengan para pakar juga dilakukan dengan membentuk tim pakar yang bisa berisikan pakar-pakar kebijakan, akademisi, pakar kesehatan, ekonomi, hukum, dll yang terkait dengan tuisi BPOM.

Selain beberapa hal diatas, peneliti juga membuat *policy brief* yang ditujukan kepada Kepala Badan POM, dalam rangka peningkatan penganggaran berbasis kinerja di BPOM. Sedangkan untuk ilmu pengetahuan peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini dengan memperhatikan alokasi anggaran pemerintah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK), karena dalam RSPP salah satu

tujuannya adalah mensinkronkan Belanja Pemerintah dan Pemerintah Daerah terutama penggunaan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU).



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Daftar Pustaka

- Achir, M. A. (1975). *Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis*. Bandung: Yulianti.
- Agung Wasono, M. M. (2018). *Tinjauan Kritis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Al Imran, M. N. (2022). Analisis Faktor –Faktor Yang Menyebabkan Inkonsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018-2020. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 25-38.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan good governance*. bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggara, S., & Sumatri, L. (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Antono, f. E., & Virdayanti, K. C. (2018). *Selected Issues in Strategic Planning of Public Sector in Indonesia* . Jakarta: Bappenas Working Papers.
- Ardhyaningtyas, Oflah, S. T., & Zunaidi, A. (2023). Informasi Kinerja Kementerian Kesehatan Berdasarkan Redesasin Perencanaan dan Penganggaran. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 41-56.
- Bappenas. (2018). *Simpul Perencana* (Vol. 31). Jakarta: Pusbindiklatren Bappenas.
- Behn, R. D. (2003). Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. *Public Administration Review*, 586-606.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Caiden, N. (2017). Public Budgeting Amidst Uncertainty and Instability. In J. Shafritz, & A. C. Hyde, *Classics Of Public Administration; Eight Edition* (p. 410). Boston: Cengage Learning.
- Chandler, R. C., & Plano, J. c. (1988). *The Public Administration Dictionary*. California: Clio Press.
- Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring efficiency of decision making unit. *European Journal of Operational Research* 2, 429-444.
- Coelli, J. T., Rao, D. P., O'Donnel, C. J., & Battese, G. E. (2005). *An introduction to effieciency and productivity: Second edition*. USA: Springer.
- Conyers, D., & Hills, P. (1984). *An introduction to development planning in the third world*. Scotland: The bath Press, Avon.
- Darto, M. (2011). Integrasi sistem Perencanaan, Penganggaran dan manajemen Kinerja : Sebuah Best Practice di Bank Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*.
- Djamhuri, A., & Mahmudi, M. (2006). New Public Management, Accounting reform, and Institutional perspective of public sector Accounting in Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 301-321.

- Donvito, P. A. (1969). *The essentials of a Planning Programming Budgeting System*. California: The Rand Corporation.
- Douglas, P. C., & Wier, B. (2000). Integrating ethical Dimensions into a Model of Budgetary Slack creation. *Journal of Business Ethics*, 267-277.
- DPD RI. (2022, 11 09). Retrieved from www.dpd.go.id:https://www.dpd.go.id/jakarta/berita/ketua-dpd-soroti-kinerja-bpom-soal-puluhan-obat-sirop-yang-punya-izin-edar-ditarik
- Drury, C. (2012). *Management and Cost Accounting Eight Edition*. United Kingdom: Brendan George.
- Dunk, A. S. (1993). The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on the Relation between Budgetary Participation and Slack. *THE ACCOUNTING REVIEW* Vol. 68, No. 2 , 400-410.
- Gaebler, T., & Osborne, D. (1992). *Reinventing government*. Plume. New York: Routledge.
- Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2012). *Educational research : competencies for analysis*. New jersey: Pearson Education, Inc.
- Geddes, P. (1904). *Civics: as Applied Sociology*. Retrieved from guttenberg.
- Goedhart, C. (1963). *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara:Terjemahan Ratmoko*. Jakarta: Jambatan.
- Gonzalez,et al. (2019). Use of the EFQM excellence model to improve hospital pharmacy. *Research in Social and Administrative Pharmacy*.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2007). *Managerial Accounting, Eighth Edition*. USA: Rob dewey.
- Hatry, H. P. (1999). *Performance Measurement: Getting Results*. USA: University Press Of America.
- Hilton, R. W., Maher, M. W., Selto, F. H., & Sainty, B. J. (2001). *Cost management : strategies for business decisions*. Kanada: McGraw-Hill ryerson Limited.
- Holzer, M., & Schwester, R. W. (2011). *Public Administration : An Introduction*. New york: Routledge.
- Hood, C. (1991). *A Public Management For All Seasons*. London: Royal Institute.
- Irawan, S. A. (2020). Pengukuran Efisiensi Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* Vol. 2 No. 1 , 43-56.
- Irawan, S. A. (2020). Pengukuran Efisiensi Kinerja anggaran Kementerian/Lembaga Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 43-56.
- Kaplan and Norton. (1992, january-february). The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance. *harvard Bussiness Review* 70 No 1, pp. 71-79.

- Karunia, R. L., & Maburur, A. (2023). *akutansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kelly, J., & Wanna, J. (2000). New Public Management And The Politics Of Government Budgeting. *International Public Management Review*, 33-55.
- Kemenkeu. (2021, Juli). *Kemenkeu*. Retrieved from <https://anggaran.kemenkeu.go.id/:https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penandatanganan-nota-kesepahaman-bersama-antara-kemenkeu-&kementerian-ppnbappenas>
- Knowlton, L. W., & Phillips, C. C. (2013). *The Logic Model Guidebook Better Strategies for Great Results*. London: Sage.
- Kristiyanti, M. (2012). Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA Vol. 3 No. 3, Sept*, 103-123.
- Kurniasih, F. N., & Widayanti, W. (2023). REDESAIN PERENCANAAN PENGANGGARAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. *Jurnal STIE Semarang*, 45-55.
- Last, M. R. (2009). *A Basic Model of Performance-Based Budgeting*. IMF.
- Madjid, N. C. (2020). Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran: Tantangan Mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif dan Efisien . *Symposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 1075). Jakarta: Kemenkeu.
- Mahmudi. (2003). New Pbulic Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. *sinergi Kajian Bisnis dan manajemen*, 69-76.
- Mardiasmo. (2018). *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mc Laughlin, K., Osborne, s. P., & Ferlie, E. (2022). *New Public Management: Current trends and future prospects*. London: Routledge.
- Mihaiu, D. M., Opreana, A., & Cristescu, P. M. (2010). Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector. *Romanian Journal of Economic Forecasting*, 132-147.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *qualitative data analysis: a methods sourcebook*. USA: Sage Publications. Inc.
- Mimba, N., & Widanaputra, A. (n.d.). The influence of participative budgeting on budgetary slack in composing local governments' budget in Bali province.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mulyono, A. A., & Hertianti, A. (2019). Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan Good Financial Governance. *Jurnal Riset akutansi dan Keuangan*, 7.
- Ningsih, S., Wirahadi, A., & Amy, F. (2018). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep Money Follow Program Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang. *Jurnal Akuntansi& Manajemen*, 1-16.

- Nurlaeli, A. (2020). Perencanaan Pembiayaan Berbasis Planning Programming Budgetting System (Ppbs) Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Anni'mah Bandung. *Jurnal Islamic Education Manajemen*.
- Osborne, S. P., & Ferlie, E. (2002). *New Public Management Current trends and future prospects*. USA: Routledge.
- Parhusip, B. (2018). Implementation Of Medium Term Expenditure Framework (Mtef) In Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara Vol 1 No 1*; 958-977.
- Pecar, Z. (2001). Performance Analysis and Policy Transfer as Preconditions of Successful PA Reform in Slovenia. *NISPAcee Occasional Papers 2, no. 4*, 27-42.
- Precilia, N. P., & Mimba, N. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kohesivitas Kelompok terhadap Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2381-2391.
- Purwandari, A. K., Adib, N., & Amirya, M. (2023). Analysis of Budgetary Slack Trigger in Government Institutions (Case Study at Bureau X Ministry of Y). *International Journal of Social Science And Human Research*, 3576-3582.
- Ramanathan, R. (2003). *An introduction to data envelopment analysis: a tool for performance measurement*. London: Sage Publications.
- Robinson, M. (2013). Performance Budgeting. In R. H. Richard Allen, *The International handbook Of Public Financial Management* (p. 237). New York: palgrave Macmillan.
- Robinson, M., & Last, D. (2009). *A Basic Model Of Performance Based Budgeting*. IMF: IMF.
- Robinson, M., & Last, D. (2009). *A Basic Model of Performance-Based Budgeting*. IMF.
- Ruslan, R. (2008). *Etika kehumasan konsepsi dan aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sajiah, F. S., & Saputra, D. (2019). Efisiensi Belanja Kesehatan Di Indonesia : Pendekatan Two-Stage Network DEA. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol.1 No 2*, 97-113.
- Sajiah, F. S., & Saputra, D. (2019). Efisiensi Belanja Kesehatan di Indonesia: Pendekatan Two-Stage Network DEA. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 97-113.
- Sanjaya, W. (2008). *Perencanaan dan desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Schick, A. (2017). The Road To PBB: The Stages of Budget Reform. In j. M. Shafritz, & A. C. Hyde, *Classics of Public administration: eight edition* (pp. 203-230). USA: Cengage Learning.
- Seknas Fitra. (2021). *Laporan Riset Implementasi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional*. Jakarta: Seknas Fitra.

- Seknas Fitra. (2021). *Policy Brief Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran* . Jakarta: Knowledge Sector Initiative.
- Setiadi, h. (2014). *Teori Perencanaan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Setianingsih, T. (2019). Analisis Penerapan Model EFQM dalam menilai Manajemen Mutu Puskesmas di 8 Propinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Medika drg Suherman*.
- Silitonga, M. S. (2018). *Corruption in Indonesia*. Holland: Univeristy of Groningen.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Sudarmanto. (2015). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, DI dimensi, Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, E., & Solichin, M. (2006). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Simposium nasional akuntansi 9 padang* . padang.
- Supardi. (2005). *Metodologi penelitian ekonomi & bisnis*. UII Pres.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Tjokroamidjojo, B. (1985). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Togerson, D. J., & Palmer, S. (1999). Economic notes: definitions of efficiency. *The BMJ*, 1136.
- Trick, M. (1996). Data envelopment analysis for consultants. *Mon Nov*, 11(15), , 33-53.
- Waldo, D. (1972). Developments in public administration. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 217-245.
- Warsono, H., Astuti, R. S., & Marom, A. (2019). *Buku Ajar Teori Administrasi*. Semarang: UNDIP.
- Watson, P. A., & Chileshe, N. (2003). Deploying and scoring the European Foundation for Quality Management Excellence Model (Part One). In *2nd International Structural Engineering and Construction Conference,(ISEC-02) (Vol. 1)*, (pp. 1595-1598). United Kingdom.
- Widyastuti, P., & Nurwahyuni, A. (2022). Analisis Efisiensi Relatif di Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 6(2).
- Wrihatnolo, r. R., & Nugroho, R. (2006). *manajemen pembangunan Indonesia sebuah pengantar dan panduan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Young, S. M. (1985). Participative Budgeting: The Effects of Risk Aversion and Asymmetric Information on Budgetary Slack. *Journal of Accounting Research*, Vol. 23, 829-842.
- Yuesti, A., Dewi, N. S., & Pramesti, I. A. (2020). *Akutansi Sektor Publik*. Denpasar: CV. Noah Aletheia.

- Yulianto, j. r., Lestari, N. A., Hartanto, & Febrianto, A. M. (2020). Evaluasi Penerapan Kebijakan Standar Struktur Biaya: Penggunaan Konsep Biaya Utama Dan Biaya Pendukung. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 2 No. 1*, 22-42.
- Yuslely Usman, Ni Ketut Aryastami, harimat Hendarwan. (2008). Penerapan European Foundation For Quality Management (EFQM) di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Untuk meningkatkan Kinerja Dinas. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 19-32.
- Indonesia, (2003). Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta
- Indonesia, (2004). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta
- Indonesia, (2007). Undang-undang republik indonesia Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2005–2025. Jakarta
- INDONESIA, (2004). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga. Jakarta
- Indonesia, (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Jakarta
- Indonesia, (2023). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Jakarta
- Indonesia, (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta
- Indonesia, (2019). Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Jakarta
- Indonesia, (2020). Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Jakarta
- Indonesia, (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta
- Indonesia, (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya

- Indonesia, (2020). Surat Edaran Bersama No S-122/MK.2/2020 B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 Tentang Pedoman Redesain sistem Perencanaan dan Penganggaran. Jakarta
- Indonesia, (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta
- Dasar-dasar Teori Perencanaan <http://repository.ut.ac.id/4330/2/PWKL4308-M1.pdf>. Diakses 08 November 2022
- Negara, L. A. (2008). Hukum Administrasi Negara. Bahan Ajar Diklatpim Tk. III. Lembaga Administrasi Negara–Republik Indonesia. Jakarta
- DPD RI. (2022, 11 09). Retrieved from www.dpd.go.id:https://www.dpd.go.id/jakarta/berita/ketua-dpd-soroti-kinerja-bpom-soal-puluhan-obat-sirop-yang-punya-izin-edar-ditarik
- <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21-18/pjpk/persyaratan-proyek/value-for-money-vfm> diakses tanggal 09 desember 2022
- <https://www.jurnal.id/id/blog/arti-value-for-money-manfaat-cara-mengukurnya-sbc/>. Diakses tanggal 07 Desember 2022
- Jokowi Minta RKP 2022 Disesuaikan dengan Tantangan Pandemi (cnnindonesia.com). Diakses 09 November 2022
- Modul Konsep dasar Penganggaran <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKAP4403-M1.pdf>. Diakses 08 November 2022